

Mendorong Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Boalemo

Ladang masyarakat yang potensial untuk dijadikan areal tanaman kayu.
Foto oleh: CIFOR/Dede Rohadi

Pendahuluan

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu skema program perhutanan sosial. Melalui program ini, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai lahan usaha tanaman kayu. Program HTR dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan (*pro poor*), menyediakan pasokan bahan baku kayu bagi kepentingan industri (*pro growth and pro job*) serta merupakan upaya rehabilitasi kawasan hutan (*pro environment*) (BAPPENAS, 2004). Program HTR telah diperkenalkan sejak tahun 2007 dengan target nasional seluas 5,4 juta ha pada akhir tahun 2016 (Dephut, 2007).

Program HTR sejalan dengan misi Nawa Cita yang digagas pemerintahan saat ini. Program ini diperkuat dengan adanya target pengembangan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha^[1].
[2] Statistik Kehutanan Indonesia (2014) mencatat luas areal pencadangan HTR sampai akhir 2013 sekitar 700 ribu ha yang tersebar di 113 kabupaten. Dari luasan tersebut Izin Usaha HTR

[1] Target hingga akhir tahun 2019.

[2] Paparan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional "Sinergitas pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan" pada acara Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan di Jakarta, tanggal 1 September 2015.

Temuan Utama

- Di Kabupaten Boalemo, inisiasi program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) lebih banyak dilakukan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V, namun kurang melibatkan petani sejak proses awal.
- Mengingat petani merupakan pelaku utama dalam usaha HTR, maka pendampingan yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V Boalemo perlu meningkatkan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani HTR. Kegiatan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan anggaran dengan indikasi dicantumkannya program pengembangan HTR di dalam struktur anggaran KPH. Instansi tersebut juga perlu memfasilitasi temu usaha antara kelompok tani HTR dengan perusahaan baik Hutan Tanaman Industri (HTI) atau industri lainnya dalam rangka pengembangan kemitraan.
- Instansi pemerintahan lainnya yang memiliki program pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo perlu berkoordinasi dengan KPH Unit V selaku ujung tombak program pembangunan kehutanan di tingkat tapak di Kabupaten Boalemo.
- Agar menjadi alternatif sumber penghasilan petani, maka kegiatan HTR harus bersifat komersial dan memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian petani HTR perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah bisnis yang sehat. Petani perlu menyesuaikan diversifikasi tanaman yang mereka usahakan dengan potensi pasar.

atau disebut juga IUPHHK-HTR (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat) mencapai 190 ribu ha, yang dikelola oleh lebih dari 6.000 pemegang izin baik koperasi maupun perorangan. Rendahnya capaian pembangunan HTR tersebut mengindikasikan masih banyaknya kendala dan tantangan dalam penerapan program tersebut di lapangan.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program HTR sejak tahun 2014. Proyek Penelitian *Agroforestry and Forestry* (AgFor) Sulawesi telah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program HTR di Kabupaten Boalemo. Hasil kegiatan penelitian menyajikan beberapa temuan kunci yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan di dalam *policy brief* ini didasarkan atas hasil analisa terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yang meliputi instansi pemerintahan di tingkat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, masyarakat di desa Rumbia, dan pelaku pasar kayu rakyat di Kabupaten Boalemo.

Progres Pembangunan HTR di Kabupaten Boalemo

Sampai tahun 2014, IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan di Kabupaten Boalemo mencakup areal seluas 521 ha, atau 27% dari total luas areal yang telah dicadangkan^[3]. Izin tersebut diberikan kepada 5 kelompok tani HTR di 3 desa, yaitu Rumbia, Wonggahu, dan Molumbulahe, melalui Surat Keputusan Bupati Boalemo No. 231 tahun 2014. Sisa areal pencadangan seluas 1.404 ha tidak bisa diproses untuk izin HTR yang baru karena berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Berdasarkan surat edaran Dirjen Planologi bulan November 2015^[4], program HTR tidak lagi dapat dilakukan di kawasan HPT.

Hasil pengamatan di Desa Rumbia menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan penanaman kayu di areal HTR. Hasil studi yang dilakukan tim AgFor Sulawesi mengemukakan bahwa perkembangan HTR di Kabupaten Boalemo selama ini lebih banyak diinisiasi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Boalemo. Instansi pemerintah daerah ini secara aktif mengajukan izin HTR untuk masyarakat di Kabupaten Boalemo, namun kurang melibatkan partisipasi kelompok tani. Sebagai akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk mengembangkan usaha penanaman kayu setelah izin HTR diperoleh.

Data demografi desa menunjukkan bahwa hampir 50% atau sekitar 950 jiwa penduduk desa tergolong di dalam usia produktif pada kisaran 20 sampai 60 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tenaga kerja cukup tersedia untuk mendukung program HTR. Masyarakat juga menyakini bahwa tanaman kayu akan memperbaiki kualitas lahan mereka yang umumnya bertopografi curam. Keberadaan tanaman kayu diharapkan dapat mencegah bahaya longsor, memberikan naungan, dan memperbaiki

[3] Luas areal pencadangan untuk mendukung Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Boalemo adalah 1.925 ha (SK Menhut No.396/Menhut-II/2010) yang disesuaikan dengan hasil revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010. Luas areal pencadangan sebelumnya 4.775 ha.

[4] Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KPH Unit V Boalemo dan Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kabupaten Boalemo tanggal 26 Januari 2016.

kesuburan tanah. Disamping itu tanaman kayu dapat digunakan sebagai tabungan keluarga. Namun demikian, saat ini mereka lebih memprioritaskan budi daya tanaman pertanian, khususnya jagung yang telah menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Untuk memotivasi kelompok tani HTR, KPH Unit V Boalemo telah membangun demplot tanaman jabon (*Anthocephalus cadamba*) seluas 15 ha pada tiap kelompok pemegang izin HTR. Penanaman dilakukan pada tahun 2014 dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman tumbuh dengan cukup baik. Namun demikian, setelah pembangunan demplot tersebut, KPH Unit V Boalemo tidak melakukan kegiatan pendampingan kelompok HTR, melainkan terbatas kepada kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Bone Bolango yang berkedudukan di Limboto juga mempunyai mandat untuk membina HTR di wilayah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2015. Tugas tersebut merupakan pengalihan dari Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan Produksi (BP2HP) yang berkedudukan di Palu, Sulawesi Tengah. Mandat tersebut berubah sejak tahun 2016 seiring dengan dibentuknya Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) yang berkedudukan di Makassar. Untuk selanjutnya tugas pembinaan HTR serta program perhutanan sosial lainnya di wilayah Sulawesi akan dijalankan oleh balai tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 23/2014, semua urusan kehutanan kecuali pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) dialihkan dari Bupati ke Gubernur. Aturan tersebut berdampak pada pengalihan kewenangan pemberian izin dan pembinaan HTR dari Bupati ke Gubernur. Penerapan UU No. 23/2014 juga akan berpengaruh terhadap mekanisme kerja KPH Unit V Boalemo. Narasumber dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Provinsi Gorontalo mengharapkan agar KPH berperan lebih besar dalam pengembangan HTR, seperti disampaikan oleh Samsul Bahri, S.Hut, M.Sc, Kepala Seksi di lingkup Dishutamben Provinsi Gorontalo:

“Di masa yang akan datang, KPH Unit V Boalemo semestinya lebih aktif dalam menjalankan fungsi pembinaan bagi pengembangan HTR, jangan terbatas pada kegiatan monev saja. Dishutamben Provinsi telah merencanakan pengadaan tenaga penyuluh kehutanan yang diberi insentif khusus untuk mendampingi kelompok HTR. KPH diharapkan berperan aktif di dalam mensinergikan berbagai program pengembangan HTR dari berbagai instansi di tingkat tapak”.

Para Pemangku Kepentingan Usaha Tanaman Kayu Rakyat di Kabupaten Boalemo

Tim Peneliti AgFor Sulawesi telah melakukan analisa para pemangku kepentingan HTR di Kabupaten Boalemo. Para pemangku kepentingan tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, menjadi kelompok sasaran (Kuadran A), kelompok pendorong

(Kuadran B), kelompok pendukung (Kuadran C), dan kelompok marjinal (kuadran D), seperti terlihat pada Gambar 1. Kelompok sasaran adalah para pemangku kepentingan yang menjadi subyek sekaligus penerima manfaat langsung dari kegiatan usaha HTR. Mereka memiliki kepentingan yang tinggi, namun tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk mengarahkan kebijakan dan program pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo. Kelompok pendorong terdiri atas para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi bagi pengembangan HTR. Kelompok inilah yang dapat berperan besar untuk menjalankan intervensi kebijakan atau program pengembangan HTR. Kelompok pendukung (kuadran C) merupakan para pemangku kepentingan yang memiliki peran untuk mensukseskan program HTR di Boalemo melalui perencanaan program khususnya dukungan alokasi anggaran. Kelompok marjinal (kuadran D) merupakan para pemangku kepentingan yang pengaruh dan kepentingannya sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan di kuadran lainnya.

Tabel 1 lebih rinci menguraikan kepentingan dan peran para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo. Hasil analisa pemangku kepentingan menyimpulkan terdapatnya unsur kesamaan kepentingan para aktor terhadap program pengembangan HTR. Persamaan kepentingan tersebut merupakan modal yang sangat baik bagi upaya pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo. Namun demikian diperlukan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan.

Potensi Pasar Kayu Rakyat di Kabupaten Boalemo

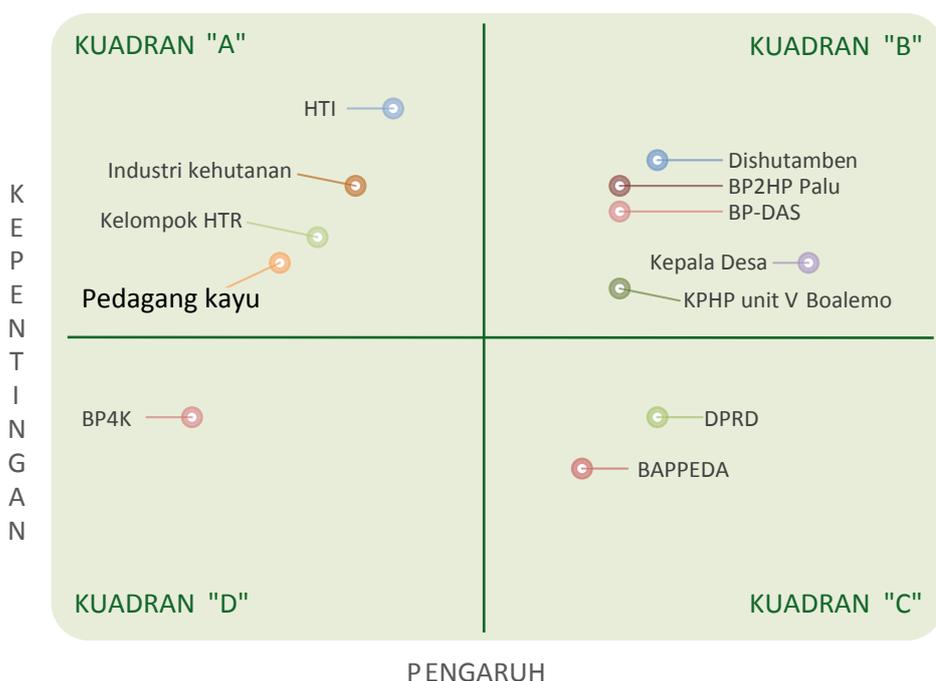
Wawancara dengan berbagai nara sumber dan pelaku pasar di Kabupaten Boalemo mengindikasikan bahwa kebutuhan bahan baku kayu di kabupaten tersebut belum terpenuhi oleh produksi kayu di wilayah kabupaten. Hasil studi rantai nilai kayu yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan

bahwa setiap tahun diperlukan sekitar 6.000 m³ kayu bulat hanya untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan serta renovasi gedung dan sekolah baru^[5]. Sejak tahun 2012 pemerintah kabupaten Boalemo telah menerapkan kebijakan moratorium pemanfaatan kayu hutan alam, sementara produksi dari tanaman kayu rakyat masih terbatas. Saat ini, kebutuhan kayu di wilayah kabupaten Boalemo sebagian besar dipasok dari kayu yang berasal dari Hutan Produksi Konversi (HPK) di wilayah kabupaten tetangga, khususnya Pohnuatu dan Gorontalo Utara dan sebagian kecil dari areal hutan rakyat.

Hasil studi juga mengidentifikasi beberapa kilang penggergajian (*sawmill*) dan perajin mebel di Kabupaten Boalemo yang terpaksa menutup usahanya karena keterbatasan pasokan kayu. Saat ini hanya terdapat dua kilang penggergajian di Kabupaten Boalemo dengan kapasitas produksi tahunan kurang dari 3.500 m³. Salah satu kilang tersebut terdapat di desa Polohungo dan beroperasi jauh di bawah kapasitas produksi^[6]. Kilang penggergajian lainnya terdapat di desa Rumbia yang saat ini terutama mengolah jenis kayu rimba campuran seperti kayu nantu (*Palaquium sp.*) Mahoni (*Switenia mahagony*), Kayu bugis (*Koordersiodendron pinnatum*), dan cempaka (*Elmerillia, sp.*), yang tumbuh secara alami di lahan milik masyarakat.

Hutan rakyat di Kabupaten Boalemo relatif belum berkembang. Terdapat sejumlah petani di desa Polohungo, Pangi dan Ayuhulalo yang telah memiliki tanaman kayu jati, namun baru berumur sekitar 10 sampai 15 tahun. Kegiatan penanaman tersebut dipicu oleh promosi bibit unggul jati oleh sebuah perusahaan swasta pada akhir tahun 1990-an. Pada umumnya masyarakat juga belum menerapkan teknik silvikultur yang baik di dalam pengelolaan tanaman kayu mereka.

Hasil studi rantai nilai kayu menunjukkan bahwa harga kayu rakyat di Kabupaten Boalemo berkisar antara Rp.400.000,- per m³ untuk jenis rimba campuran sampai di atas Rp.1.000.000,- untuk jenis kayu indah. Harga kayu jati (tanaman rakyat) ditentukan berdasarkan kelipatan 1 cm atas diameter kayu. Kisaran harga kayu bulat dan kayu gergajian di Kabupaten Boalemo disajikan pada Tabel 2.



Gambar 1. Para pemangku kepentingan di dalam program HTR di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

[5] Berdasarkan informasi Bapak Yunus Muda, Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo, 26 Januari 2016.

[6] Wawancara dengan pemilik kilang di Desa Polohungo menunjukkan bahwa akhir-akhir ini dia hanya menyediakan jasa penggergajian dengan jumlah yang sangat sedikit (kurang dari 10 m³ per bulan).

Tabel 1. Kepentingan dan peran para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo.

No.	Pemangku kepentingan	Kepentingan	Peran
I Kuadran A: Kelompok sasaran			
1	Kelompok HTR	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan dari hasil HTR. - Pengembangan bisnis HTR. - Kelestarian Sumber Daya Hutan (SDH). 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan usaha tanaman kayu di areal HTR. - Menyediakan pasokan bahan baku kayu untuk industri lokal. - Menciptakan lapangan kerja untuk usaha berbasis kehutanan.
2	Pedagang/Industri kayu lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Kesempatan memperoleh keuntungan finansial dari jual beli/pengolahan kayu. - Kesenambungan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan pasar kayu hasil HTR. - Menyediakan pasokan bahan baku kayu untuk industri lokal. - Menciptakan lapangan kerja untuk usaha berbasis kehutanan.
3	Industri/HTI	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh pasokan kayu untuk kebutuhan industri. - Membangun citra positif dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi mitra usaha kelompok HTR - Menyediakan pasar kayu hasil HTR. - Memberikan bantuan teknis dalam proses produksi hutan tanaman.
II Kuadran B: Kelompok Pendorong			
1	Instansi daerah (KPH Unit V Boalemo, Dishutamben Kabupaten Boalemo dan Dishutamben Provinsi Gorontalo)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. - Kelestarian SDH. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan teknis dalam rangka penguatan kapasitas kelompok HTR (pengembangan bisnis) - Mengusulkan dan menyalurkan bantuan pemerintah daerah (APBD) baik berupa anggaran pembangunan maupun sarana produksi (bibit, peralatan).
2	UPT Kementerian LHK (BPDAS PS dan BP2HP) ^[7]	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. - Kelestarian SDH. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan norma standar, pedoman dan kriteria pengelolaan hutan. - Memberikan bantuan teknis dalam rangka penguatan kapasitas kelompok HTR (pengembangan bisnis). - Mengusulkan dan menyalurkan dana bantuan pemerintah pusat (APBN), baik berupa anggaran pembangunan maupun sarana produksi (bibit, peralatan).
3	Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. - Kelestarian SDH. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Peningkatan PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membina kelompok dalam upaya penguatan kapasitas usaha. - Mendukung usulan kelompok kepada pemerintah daerah dan pusat. - Memantau dan melaporkan pelaksanaan program pengembangan HTR kepada instansi terkait.
III Kuadran C: Kelompok Pendukung			
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Boalemo.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Kelestarian SDH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan APBD untuk pengembangan program HTR di daerah. - Mengkoordinasikan program sektoral lingkup kabupaten dalam rangka pengembangan HTR.
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dan kepercayaan dari masyarakat. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Kelestarian SDH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan kebijakan yang mempermudah investasi di bidang usaha berbasis kehutanan. - Mendukung usulan pemerintah kabupaten dalam rangka pengembangan HTR. - Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pembangunan di daerah.
IV Kuadran D: Kelompok Marjinal			
1	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Boalemo.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Kelestarian SDH. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan teknis dalam rangka penguatan kapasitas kelompok HTR (pengembangan bisnis).

[7] Berdasarkan perkembangan struktur organisasi di Kementerian LHK, fungsi pembinaan program perhutanan sosial dialihkan dari BPDAS PS Bone Bolango ke Balai PSKL di Makassar.

Tabel 2. Harga kayu rakyat di Kabupaten Boalemo

No	Bentuk kayu	Jenis Kayu	Harga (Rp/m ³)
1.	Kayu Bulat	Rimba campuran	400.000 – 600.000
		Kayu indah	800.000 – 1.100.000
		Kayu jati	10.000 per 1 cm diameter kayu
2.	Kayu gergajian	Rimba campuran	
		Di Kab. Boalemo	1.500.000 – 1.750.000
		Di Kota Prov. Gorontalo	2.100.000 – 2.500.000

Pada dasarnya pohon kayu yang berdiameter besar lebih disukai pengepul kayu (*balenthe*)^[8] karena memberikan keuntungan yang lebih besar. Diameter pohon merupakan parameter yang paling berpengaruh dalam penentuan harga kayu, sebagaimana yang telah disimpulkan oleh penelitian terdahulu di Jawa (Stewart dkk., 2014).

Dengan adanya perusahaan HTI di Kabupaten Gorontalo Utara dan kemungkinan pendirian industri kayu lapis oleh perusahaan tersebut, maka peluang pasar bagi tanaman kayu rakyat di Kabupaten Boalemo semakin terbuka. Tim peneliti AgFor Sulawesi telah memfasilitasi pertemuan awal untuk mengembangkan kemitraan usaha antara petani HTR di desa Rumbia dengan perusahaan HTI tersebut. Melalui kemitraan usaha, diharapkan kelompok HTR dapat memperoleh bantuan sarana produksi (bibit, pupuk) dan pemasaran hasil kayu dari pihak perusahaan. Namun demikian, peluang kerjasama usaha masih memerlukan dorongan fasilitasi temu usaha lebih lanjut antara kelompok HTR dengan pihak HTI.

Tantangan Pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo

Masyarakat di Kabupaten Boalemo khususnya para pemegang izin HTR di Desa Rumbia masih belum memahami maksud dan tujuan program HTR. Inisiasi program HTR selama ini lebih didorong oleh KPH Unit V Boalemo sebagai salah satu target kinerja lembaga tersebut. Keterbatasan pemahaman masyarakat atas program HTR menyebabkan rendahnya motivasi mereka untuk berinvestasi di dalam usaha tanaman kayu. Sebagai contoh, untuk pengadaan bibit mereka masih mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pada aspek permodalan, mereka belum bisa memanfaatkan fasilitas kredit Badan Layanan Umum (BLU) untuk program HTR yang telah disediakan Kementerian LHK, karena ketidakpahaman tata cara/prosedur pengajuan kredit. Rata-rata tingkat pendidikan yang rendah (80% penduduk di desa Rumbia hanya menempuh pendidikan dasar) juga menjadi faktor penghambat bagi upaya pemahaman yang lebih baik atas program HTR.

Pada aspek kelembagaan, upaya pengembangan HTR di Kabupaten Boalemo terhambat oleh permasalahan koordinasi di antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Peraturan

[8] Hasil survei rantai nilai kayu mengindikasikan bahwa keuntungan pengepul kayu (*balenthe*) meningkat untuk transaksi jual beli kayu dengan diameter di atas 60 cm. Margin keuntungan berada pada kisaran Rp.2.000.000,- sampai Rp.5.000.000,- per kontainer kayu bulat jati (24 m³), tergantung kepada kualitas kayu (informasi dari Pak Haris, seorang *balenthe* di Desa Ayuhulalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo).

Menteri Kehutanan yang mengatur tentang tupoksi KPH^[9] tidak secara tegas menjelaskan tugas pokok dan fungsi KPH di dalam pelaksanaan program HTR. Hasil wawancara dengan staf KPH Unit V Boalemo mengindikasikan bahwa peran KPH dalam pelaksanaan program HTR sebatas kegiatan monitoring dan evaluasi. Pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perubahan struktur dan tupoksi lembaga yang sering terjadi juga menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebagai contoh, pembinaan HTR di Kabupaten Boalemo semula dilakukan oleh BP2HP yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah. Pada tahun 2015 tugas tersebut dialihkan ke BPDAS Bone Bolango di Limboto Gorontalo. Setahun kemudian tugas tersebut dialihkan ke Balai PSKL yang berlokasi di Makassar, yang bertanggung jawab untuk pengembangan program perhutanan sosial di wilayah Sulawesi. Rentang kendali yang terlalu luas dari unit pembina HTR menjadi tantangan tersendiri di dalam mengintensifkan kegiatan pembinaan di tingkat tapak. Diterbitkannya Undang Undang No. 23 tahun 2014 yang mengalihkan kewenangan pengurusan kehutanan dari tingkat kabupaten ke provinsi, juga akan memperpanjang waktu persiapan lembaga pembina sebelum mengimplementasikan kegiatannya secara nyata di tingkat tapak.

Hasil observasi tim peneliti AgFor Sulawesi menunjukkan bahwa kondisi areal HTR di Boalemo bertopografi curam dengan akses yang relatif sulit. Kondisi tersebut akan berdampak pada tingginya biaya produksi dan eksploitasi kayu. Dengan kondisi lahan tersebut pola agroforestri merupakan pilihan terbaik untuk diterapkan dibandingkan pola tanaman kayu monokultur.

Rekomendasi Kebijakan

Upaya untuk mengembangkan HTR di Kabupaten Boalemo masih memerlukan intervensi dari instansi terkait, baik pusat maupun daerah. Kapasitas kelompok tani merupakan faktor kunci yang perlu ditingkatkan agar petani dapat menjalankan usaha HTR secara menguntungkan. Kelompok tani HTR perlu dibekali dengan pengetahuan teknis maupun bisnis yang meliputi pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan HTR, prospek pasar kayu, teknik silvikultur, serta akses terhadap modal.

Usaha HTR harus memiliki daya saing tinggi sebagai sumber penghasilan petani. Pola usaha tani di dalam program HTR perlu disesuaikan dengan potensi pasar di daerah setempat. Kelompok tani HTR juga perlu dibina dalam aksi kolektif agar menjadi kelompok usaha bersama yang mandiri dan mampu bermitra dengan industri.

KPH Unit V Boalemo perlu berperan lebih aktif sebagai instansi pembina di tingkat tapak dalam penguatan kapasitas kelompok tani HTR. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Gorontalo untuk menegaskan fungsi KPH Unit V Boalemo untuk menjalankan fungsi koordinasi implementasi program HTR diantara instansi pemerintah terkait lainnya, seperti Dishutamben Provinsi Gorontalo dan UPT Kementerian kehutanan (BPDAS, Balai PSKL, BP2HP). Program KPH tersebut harus didukung

[9] Permenhut No. 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada KPHP dan KPHL pasal 3.

oleh komitmen pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi pendanaan di dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pengembangan HTR, KPH Unit V Boalemo perlu melakukan kegiatan antara lain:

- Bekerjasama dengan Balai PSKL Makassar dalam melaksanakan program Balai PSKL di wilayah Kabupaten Boalemo.
- Bekerjasama dengan Dishutamben Provinsi Gorontalo untuk memfasilitasi kemitraan usaha antara kelompok tani HTR dengan industri HTI dan fasilitasi dalam pengurusan dokumen tata usaha kayu, seperti SVLK, SIPUHH, SIMPONI^[10].
- Bekerjasama dengan BP4K Kabupaten Boalemo untuk melakukan berbagai kegiatan pelatihan yang dibutuhkan petani HTR.
- Bekerjasama dengan BLU Pusat Pembiayaan Kehutanan untuk memfasilitasi akses kelompok HTR terhadap kredit modal pembangunan hutan tanaman rakyat.

[10] SVLK = Sistem Verifikasi Legalitas Kayu; SIPUHH = Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan; SIMPONI = Sistem Informasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) On line.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2004. Strategi Pembangunan Nasional 2004-2009. Jakarta.
- Departemen Kehutanan (Dephut). 2007. Dephut alokasikan lahan hutan 5,4 juta ha untuk usaha HTR dengan dukungan dana reboisasi. Siaran pers Nomor S.51/II/PIK-1/2007. <http://www.dephut.go.id/index.php>.
- Rohadi D, Herawati T, Padoch C and Race D. 2015. Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi petani. Info Brief No. 128. Center for International Forestry Research.
- Stewart HTL, Rohadi D, Manalu P, Herawati T, Oktalina SN, Rohman, Putro WT, Utomo S, Ningrum LW, Hidayat R, Irawanti S, Pramestisuka A, Parlinah N, Bisjoe AR, Muin N, Hayati N, Waka AK, Sumirat BK, Syafii S, Julmansyah, Aryanti ND, Waluyadi YK, Darisman A, Silvia D. 2014. *Research Task 3: Evaluation of the dominant business models of community-based commercial forestry being implemented by government and the private sector*. Report of a study conducted in Gunungkidul, Pati, Bulukumba, Konawe Selatan and Sumbawa, ACIAR Project FST/2008/030 – Overcoming constraints to community-based commercial forestry in Indonesia. Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research, 46 pp.

Penulis

Dede Rohadi, Iswan Dunggio, Tuti Herawati, Duman Wau, Yahya Laode.

Sitasi

Rohadi D, Dunggio I, Herawati T, Wau D, Laode Y. 2016. *Mendorong Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Boalemo*. Policy Brief no 66. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DFATD, ICRAF, CIFOR, JAPESDA, dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian ini yang merupakan bagian dari proyek *Agroforestry and Forestry Sulawesi: Linking Knowledge to Actions*. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang telah membantu saat penelitian dilakukan, khususnya di Desa Rumbia, Kabupaten Boalemo.

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).



Canada



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Dede Rohadi (d.rohadi@cgiar.org)

World Agroforestry Centre (ICRAF)
Southeast Asia Regional Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
[PO Box 161, Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415 | Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org